

Profil Organisasi

Dokumen Pengenalan Organisasi — 1 Oktober 2026

MATAHARI08 adalah organisasi relawan masyarakat sipil yang bergerak dalam kegiatan sosial, edukasi publik, dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini mendukung pelaksanaan program-program pemerintah untuk Indonesia yang lebih maju dengan cara yang independen, transparan, dan berbasis partisipasi warga.

Visi

Menjadi organisasi relawan yang aktif, terbuka, dan terpercaya — dekat dengan masyarakat serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan Indonesia.

Misi

- Menyelenggarakan edukasi publik tentang program pemerintah berbasis sumber resmi.
- Menggerakkan kegiatan sosial dan kemanusiaan di tingkat lingkungan.
- Mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan komunitas.
- Membangun organisasi yang tertib, transparan, dan profesional.
- Memperkuat persatuan dan gotong royong dalam keragaman.

Ruang Lingkup Kegiatan

Pilar	Uraian Kegiatan
Sosialisasi dan Edukasi Publik	Diskusi publik, materi edukasi program pemerintah berbasis sumber resmi, kanal tanya jawab warga.
Sosial dan Kemanusiaan	Bantuan sosial, dukungan donor darah komunitas, gotong royong lingkungan, kunjungan sosial.
Pendidikan dan Literasi	Taman baca komunitas, kelas pendampingan belajar, literasi digital untuk dewasa dan lansia.
Pemberdayaan Ekonomi	Pendampingan dasar usaha mikro: legalitas, pemasaran digital, pembukuan sederhana.
Ketahanan Pangan	Pemanfaatan pekarangan dan lahan komunitas, edukasi gizi keluarga, kebun edukasi.
Pengembangan Relawan	Kelas pengenalan organisasi, pelatihan komunikasi publik, dokumentasi, dan praktik lapangan.

Prinsip dan Batasan

MATAHARI08 bukan lembaga pemerintah dan tidak mewakili kepresidenan maupun partai politik mana pun. Seluruh informasi mengenai program pemerintah yang disebarkan mengacu pada kanal resmi, tanpa klaim anggaran, pencapaian, maupun jumlah penerima yang belum terverifikasi. Kegiatan yang belum terlaksana tidak dipublikasikan sebagai dokumentasi.

Dokumen profil ini merupakan pengenalan umum. Informasi kepengurusan resmi diperbarui setelah kepengurusan ditetapkan secara sah.